

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pola Pekerjaan Petani : Kasus Desa Andaman, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan

Norma Yuni Kartika, Universitas Lambung Mangkurat
Sheilia Novitriani, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan
Email: norma.kartika@ulm.ac.id

Abstrak

Kebijakan pemerintah yang diambil untuk mencegah penyebaran COVID-19 berdampak pada sektor ketenagakerjaan, termasuk penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perubahan pola pekerjaan kepala keluarga petani dimasa pandemi. Lokasi penelitian di Desa Andaman, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani yang dipilih secara purposif. Sampel dalam penelitian ini keluarga dengan pekerjaan utama kepala keluarga yaitu petani dan memiliki istri berusia 15-49 tahun. Besar sampel 30 responden yang ditentukan menggunakan metode sampel kuota dan diambil secara acak. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis dengan metode statistik sederhana. Hasil temuan penelitian yaitu 13,33 persen kepala keluarga kehilangan pekerjaan utama sebagai petani. Pola yang sama terjadi pada pekerjaan sampingan, sebelum adanya pandemi 36,7 persen kepala keluarga petani tidak memiliki pekerjaan sampingan, persentasenya meningkat setelah ada pandemi menjadi 80 persen. Kepala keluarga yang Kehilangan pekerjaan utama sebagai petani dan kehilangan pekerjaan sampingan tentu saja berdampak pada ekonomi keluarga.

Kata Kunci: *dampak, pandemi, pekerjaan, petani*

Abstract

Government policies which taken to prevent the spread of Covid-19 have an impact on the labor sector, including people who work in the agricultural sector. Purpose of this study is to determine changes in the work patterns of farmer household heads during the pandemic. The research location is in Andaman Village, Anjir Pasar District, Barito Kuala Regency, South Kalimantan Province, with the majority of the population work as farmers who are selected purposively. The sample in this study is families with the main occupation of the household heads are farmers and have wives aged 15-49 years. The sample size of 30 respondents is determined using the quota sample method and taken randomly. The analysis using a descriptive analytical manner with a simple statistical method. Findings of the study show that 13.33 percent of household heads lost their main jobs as farmers. The same pattern occurs in the side jobs, before the pandemic 36.7 percent of farmer household heads do not have side jobs and after the pandemic, the percentage increase to 80 percent. Indeed the household heads who loses their main job as farmers and lose the side job have an impact on the economy of the families.

Keywords: *impacts, pandemic, labor, farmers*

Pendahuluan

Awal tahun 2020, penduduk dunia dikejutkan oleh hadirnya virus yang memporak porandakan hampir semua sektor kehidupan. Virus tersebut bernama coronavirus jenis baru atau SARS-CoV-2, sedangkan nama penyakitnya adalah *Corona Virus Disease* (COVID-19). Virus ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan yang kemudian merebak sampai ke beberapa Negara termasuk Indonesia. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan bahwa *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai pandemi. Seperti yang ditulis Chakraborty & Maity (2020) bahwa COVID-19 mempengaruhi dunia dengan ukuran yang hampir sama. Semua Negara-negara di dunia yang terdampak COVID-19 mengalami hal yang sama yaitu jumlah kematian yang semakin meningkat karena virus ini belum ada obatnya. Di samping itu, dampak lain yang dialami lebih dirasakan terutama pada sektor ekonomi.

Di Indonesia kasus COVID-19 pertama terdeteksi pada 2 Maret 2020 dan semakin mewabah di seluruh provinsi di Indonesia, tidak terkecuali provinsi Kalimantan Selatan. Di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Barito Kuala, penduduk yang positif COVID-19 sebanyak 147, sembuh 406 dan meninggal 6 orang pada tanggal 27 Agustus 2020 (Diskominfo Provinsi Kalsel, 2020). Berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Pemerintah telah berupaya untuk menekan kenaikan kasus COVID-19 dengan melakukan berbagai hal seperti menggalakan anjuran untuk tetap di rumah, sekolah secara daring, penerapan *work from home* (WFH), penerapan protokol kesehatan dengan menggunakan masker bila keluar rumah dan mencuci tangan sesering mungkin, serta pembatasan aktifitas sosial yang dilaksanakan dengan cara Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penerapan PSBB secara maksimal di beberapa wilayah di Indonesia bila dilaksanakan dengan efektif akan membawa dampak yang baik pada penanganan kasus COVID-19. PSBB yang merupakan kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia dapat menjadi salah satu cara yang efektif bila semua masyarakat disiplin dan pemerintah melakukan pembatasan pada transportasi publik, perkantoran, pemukiman hingga kegiatan sosial budaya dan keagamaan kata Hermawan Saputra Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (Puspa, 2020).

Dampak COVID-19 memang di luar perkiraan banyak pihak. Dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 tidak hanya di sektor kesehatan, tetapi diseluruh sektor kehidupan manusia. Dampak multidimensional akibat pandemi menurut Nurwati & R. N (2020) yaitu menyusutnya ruang dan kesempatan kerja. Kebijakan penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 berdampak besar pada sektor ketenagakerjaan. Bahkan menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kondisi pandemi yang dihadapi Indonesia berpotensi menambah jumlah pengangguran dan di proyeksikan potensi pengangguran hingga 4,22 juta orang (Komalasari, 2020). Pandemi COVID-19 juga berdampak di bidang pertanian. Berbagai hasil pertanian merupakan bagian dari kebutuhan pokok manusia, sehingga permintaan produk pertanian akan tetap ada dalam situasi pandemi. Meskipun Pandemi juga membawa perubahan pada perilaku konsumen tetapi dampaknya tidak sebesar di sektor lain. Penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam tentang dampak pandemi COVID-19 pada sektor pertanian, khususnya dampak yang dialami oleh petani.

Di Desa Andaman, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, warga yang berprofesi sebagai petani hampir 85 persen. Pertanyaan penelitian ini adalah adakah perubahan pola pekerjaan kepala keluarga petani di masa pandemi ini. Maka dari itu, tujuan penelitian untuk mengetahui perubahan pola pekerjaan kepala keluarga petani.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Andaman, Kecamatan anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif. Lokasi penelitian dipilih karena merupakan daerah lumbung padi dan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Kecamatan Anjir Pasar merupakan jalan lintas provinsi Kalimantan Selatan-Kalimantan Tengah.

Desain penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah seluruh Kepala Keluarga (KK) di Desa Andaman yang berjumlah 499 KK. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala keluarga dengan jenis pekerjaan utama sebagai petani. Petani adalah mereka yang sementara waktu atau tetap menguasai sebidang tanah pertanian, menguasai suatu cabang usaha tani atau beberapa cabang usaha tani dan mengerjakan sendiri maupun dengan tenaga bayaran (Samsudin, 1982). Menguasai sebidang tanah diartikan sebagai penyewa, bagi hasil (penyakap) atau pemilik. Adapun jumlah sampel yaitu 30 keluarga yang terdapat di Desa Andaman. Penentuan jumlah sampel menggunakan metode sampel kuota, yaitu metode memilih sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu dan kuota yang diinginkan (Mantra & Bagoes, 2004). Sampel penelitian berjumlah 30 keluarga dan diambil secara acak dengan pertimbangan sampel homogen. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan observasi yang dilakukan sebelum penelitian dilakukan.

Variabel dalam penelitian ini antara lain pekerjaan utama sebelum pandemi, pekerjaan utama setelah pandemi, pekerjaan sampingan sebelum pandemi dan pekerjaan sampingan setelah pandemi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dijelaskan dengan menggunakan persentase. Pekerjaan dalam penelitian ini adalah suatu mata pencaharian yang dilakukan seseorang dalam mencari nafkah. Definisi pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan merujuk pada pendapat Bartos (1999). Pekerjaan utama adalah jika seseorang hanya mempunyai satu pekerjaan maka pekerjaan tersebut digolongkan sebagai pekerjaan utama. Dalam hal pekerjaan yang dilaksanakan lebih dari satu, maka penentu pekerjaan utama adalah waktu terbanyak yang digunakan. Sedangkan jika waktu yang digunakan sama maka penghasilan yang terbesar sebagai pekerjaan utama. Pekerjaan sampingan adalah pekerjaan lain di samping pekerjaan utama.

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai bencana nasional. Tindak lanjut dari pencegahan penyebaran COVID-19 yaitu pengambilan kebijakan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 4 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin sebagai bukota provinsi menjadi kota pertama di Kalimantan Selatan yang mengajukan PSBB pada 17 April 2020 dan tanggal 19 April 2020 telah disetujui oleh Menteri Kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/262/2020 (Diskominfo Provinsi Kalsel, 2020). Kebijakan PSBB di Kota Banjarmasin ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan. Selama masa PSBB. Kota Banjarmasin menerapkan beberapa aturan berupa larangan, pembatasan dan pengecualian. Di dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Kota Banjarmasin, beberapa hal yang menjadi larangan di antaranya adalah keluar dan masuk Kota Banjarmasin khususnya bagi penduduk yang berasal dari luar Kota Banjarmasin, pembatasan pekerja di kawasan proyek untuk pekerjaan konstruksi, pembatasan aktifitas di sekolah dan kantor, serta pembatasan sektor perdagangan. Peraturan ini berdampak pada penduduk yang berasal dari luar Kota Banjarmasin untuk bisa bekerja di Kota Banjarmasin khususnya bagi warga yang tinggal di

kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kota Banjarmasin seperti Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.

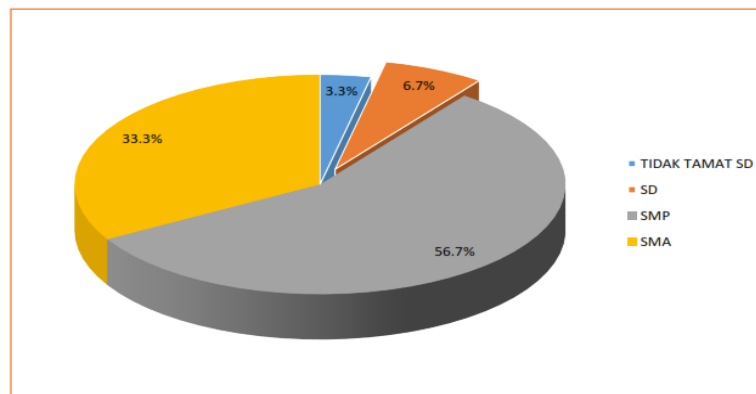
Dimulainya PSBB di Kota Banjarmasin kemudian diikuti oleh penerapan PSBB di kota lainnya. Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala yang merupakan wilayah penyangga Kota Banjarmasin kemudian menyusul melakukan PSBB. Sehingga seluruh perbatasan kota/kabupaten tersebut diberi pos penjagaan. Penduduk di wilayah kabupaten/kota tersebut tidak bisa keluar dan masuk bila tidak berkepentingan. Penerapan PSBB di tiga wilayah penyangga tersebut bertujuan untuk mendukung PSBB di ibukota provinsi yaitu Kota Banjarmasin yang telah lebih dulu menerapkan PSBB. Kebijakan ini berdampak pada seluruh sektor yang telah dilakukan pembatasan sesuai dengan aturan yang ditetapkan selama PSBB. Hal ini tidak terkecuali juga dirasakan oleh penduduk di Kabupaten Barito Kuala, termasuk petani di Desa Andaman.

1. Kondisi Daerah Penelitian

Desa Andaman merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah Penduduk di Desa Andaman 1.254 jiwa terdiri dari 639 jiwa penduduk laki-laki dan 615 jiwa penduduk wanita, yang termasuk dalam 499 keluarga. Luas Desa Andaman 8 Km², dengan rata-rata penduduk 157 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk tahun 2017-2018 0,97 persen (Badan Pusat Statistik (BPS), 2019). Penduduk di desa ini 85 persen memiliki pekerjaan utama atau pekerjaan sampingan sebagai petani. Desa Andaman terdapat 1 Gapoktan dan 10 Kelompok Tani dengan anggota 398 orang.

2. Karakteristik Responden

Kepala keluarga dalam penelitian ini seluruhnya beragama Islam dan bersuku Banjar. Pendidikan kepala keluarga berdasarkan Gambar 1 mayoritas tamatan SMP sebesar 56,7 persen dan tamatan SMA 33,3 persen. Artinya kepala keluarga memiliki pendidikan sesuai dengan program pemerintah terkait wajib belajar sembilan tahun dan dua belas tahun. Hanya 3,3 persen dan 6,7 persen kepala keluarga yang berpendidikan tidak tamat SD dan tamat SD.



Gambar 1 Tingkat Pendidikan Responden

3. Perubahan Pola Pekerjaan Responden

Berdasarkan hasil penelitian terdapat perubahan pekerjaan utama sebelum dan sesudah pandemi. Sebelum pandemi seluruh responden pekerjaan utamanya adalah petani, setelah pandemi yang bekerja sebagai petani hanya 86,67 persen, sisanya sebanyak 3,33 persen bekerja sebagai buruh pabrik dan 10 persennya lagi tidak bekerja. Pandemi COVID-19 tidak hanya membuat buruh/karyawan/pegawai kehilangan pekerjaannya atau terjadi penurunan pendapatan, penduduk yang bekerja di sektor pertanian pun terkena imbas yang sama. Ngadi dan Purba (2020) mengatakan bahwa COVID-19 telah menghantam semua sektor dan jenis pekerjaan di Indonesia dengan tingkat keparahan yang berbeda. ILO monitor (2020) telah memprediksi satu dari enam pekerja muda akan kehilangan pekerjaan pada masa pandemi COVID-19.

Dari berbagai sektor ekonomi, sektor pertanianlah yang memiliki nilai ekonomi yang dapat membuat Indonesia bertahan dari ancaman krisis global, termasuk krisis yang diakibatkan pandemi COVID-19 saat ini. Hal tersebut karena sektor pertanian selalu menjadi kebutuhan sehari-hari, dan pengerjaannya tidak terlalu sulit yaitu hanya memakan waktu tanam. Kondisi saat ini sebagai momentum untuk menggenjot produksi pertanian seperti buah dan sayur-sayuran serta komoditas perkebunan untuk meredam impor (Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, 2020). Waktu yang tidak dapat ditentukan kapan wabah ini akan berakhir lambat laun mempengaruhi pola pekerjaan di sektor pertanian ini. Berdasarkan pola pemilikannya Rondhi dan Hariyanto Adi, (2018) petani di sektor pertanian dibagi menjadi 3 jenis yakni lahan milik sendiri, lahan sewa, dan lahan bagi hasil. Responden yang tidak lagi bekerja di sektor pertanian dikarenakan sawah yang selama ini mereka tanami bukanlah milik sendiri melainkan milik orang lain. Mereka berbagi hasil panen, dengan perbandingan pembagian hasil padi 65 persen untuk yang menggarap sawah dan 35 persen untuk pemilik sawah. Alasan kenapa sawah yang digarap diminta kembali oleh pemiliknya adalah pemilik sawah merupakan tenaga kerja Indonesia (TKI) dimana sejak terjadinya pandemi tidak bisa berangkat ke luar negeri. Tidak diketahuinya kapan akhir dari pandemi menyebabkan pemilik sawah memutuskan untuk menanam sendiri sawahnya.

Pola pemilikan lahan pertanian mempengaruhi pergeseran pola pekerjaan petani itu sendiri, menurut Rondhi & Hariyanto Adi (2018) secara umum pola lahan milik sendiri dan sewa memiliki aturan masing – masing dalam sistem bagi hasil dan juga kewajiban dan hak pemilik dan penggarap lahan pertanian. Perbedaan proporsi bagi hasil serta aturan pembagian hak dan kewajiban akan mempengaruhi kinerja petani penggarap yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja usahatani. Lebih jauh lagi, perbedaan struktur usahatani petani pemilik (*farmer*), petani penggarap lahan sewa (*tenant farmer*), dan petani penggarap lahan bagi hasil (*sharecropper*) juga akan membuat kinerja masing-masing petani berbeda.

Tabel 1. Persentase Pekerjaan Utama dan Pekerjaan Sampingan Sebelum dan Sesudah Pandemi Kepala Rumah Tangga

Pekerjaan Utama		Pekerjaan Kepala Keluarga			
		Pekerjaan Sampingan			
Sesudah Pandemi (%)		Sebelum Pandemi (%)		Sesudah Pandemi (%)	
Petani	86,7	Tukang Bangunan	16,7	Pedagang	6,7
Buruh Pabrik	3,3	Pedagang	10	Jasa	13,3
Tidak Bekerja	10	Jasa	26,6	Tidak Memiliki	80
		Mencari Ikan	10		
		Tidak Memiliki	36,7		
Jumlah	100	Jumlah	100	Jumlah	100

Sumber: olah data primer, 2020

Kebiasaan masyarakat di lokasi penelitian adalah menanam padi pada bulan Februari dan panen pada bulan Agustus. Jarak dari menanam padi hingga panen membutuhkan waktu 6 bulan. Setelah panen, sawah ditinggalkan hingga bulan Oktober. Pertengahan bulan November petani mulai menanam bibit padi. Sistem irigasi padi menggunakan sistem tadah hujan. Apabila selesai musim tanam atau musin panen, petani memiliki banyak waktu luang dan dipergunakan untuk kegiatan yang menambah pendapatan. Ada semacam pemahaman bahwa hasil dari panen padi, berasnya digunakan untuk kebutuhan pokok makan (beras) hingga panen berikutnya dan mereka tinggal mencari penghasilan tambahan di luar sektor pertanian untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup lainnya.

Selain memiliki pekerjaan utama, petani di Desa Andaman 63,3 persen memiliki pekerjaan sampingan. Kondisi ini sesuai dengan kebiasaan petani dimana hasil tani digunakan untuk makan sehari-hari. Oleh sebab itulah petani ini membutuhkan pekerjaan sampingan di luar sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa pekerjaan sampingan responden sebelum terjadi pandemi adalah 26,6 persen bekerja di bidang jasa, 16,7 persen sebagai tukang bangunan, masing-masing 10 persen bekerja sebagai pedagang dan mencari ikan. Adanya pandemi membuat 80 persen responden tidak lagi memiliki pekerjaan sampingan, hanya 13,3 persen yang memiliki pekerjaan sampingan di sektor jasa dan 6,7 persen berdagang.

Sektor pertanian merupakan sektor yang tenaga kerjanya dengan mudah memasukinya, hal ini terjadi karena dalam pertanian tidak membutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi dan ketrampilan khusus. Oleh karena itu tenaga kerja di bidang pertanian yang memiliki pendidikan menengah keatas akan mencari pekerjaan di sektor lain yang lebih layak dan mendapat upah setiap hari, minggu atau bulan. Di daerah penelitian ini para petani memilih untuk memiliki pekerjaan sampingan karena hasil pertanian yang diperoleh yaitu beras untuk pemenuhan kebutuhan pokok makanan, sedangkan untuk kebutuhan hidup lainnya mereka memiliki pekerjaan sampingan.

Diberlakukannya PSBB membuat responden yang bekerja sebagai tukang bangunan jadi kehilangan pekerjaan sampingan. Kondisi ini disebabkan karena adanya larangan keluar maupun masuk ke Kota Banjarmasin yang menjadi lokasi proyek bangunan. Imbas dari diberlakukannya PSBB, otomatis semua proyek bangunan berhenti beroperasi yang tentunya berdampak pada hilangnya pekerjaan sampingan yang dimiliki sebelum adanya pandemi. Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan temuan Ngadi, Meilanna, & Purba (2020) bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah. Kebijakan tersebut mengubah kebijakan sosial ekonomi masyarakat. Keadaan ini berdampak luas terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat termasuk keberlangsungan pekerjaan dan penurunan pendapatan pekerja. Kegiatan konstruksi bangunan yang terhenti, sehingga karyawannya berhenti bekerja tanpa mendapatkan pesangon.

Hasil penelitian lainnya tentang dampak PSBB terhadap kehidupan ekonomi masyarakat juga menunjukkan hasil yang serupa dengan hasil penelitian ini. Hadiwardoyo (2020) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa PSBB mengakibatkan kerugian ekonomi nasional. Selanjutnya Nasruddin, Rindam, & Haq (2020) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa PSBB memberikan dampak negatif khususnya bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal. Bagi pekerja yang berpenghasilan rendah dan bekerja di sektor informal, kebijakan PSBB semakin memberatkan kondisinya karena terbatasnya aktifitas yang diperbolehkan selama masa PSBB sehingga mereka kesulitan dalam mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Nasruddin et al., 2020).

Hasil survey yang dilakukan oleh Asiati (2020) selama pandemi COVID 19 terjadi memiliki dampak yaitu beberapa pengusaha menghentikan usaha dan menurunkan produksinya, secara tidak langsung maka hal ini kan mengakibatkan pengurangan tenaga kerja. Kehilangan pekerjaan karena PHK adalah salah satu dampak yang dialami oleh pekerja pada masa pandemi COVID 19 ini, hasil survey yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2020 sebanyak 15,6% pekerja kehilangan pekerjaannya atau terkena PHK dari tempat bekerja mereka. Sektor ekonomi yang melakukan pengurangan tenaga kerja hampir semua sektor, namun yang paling tinggi adalah sektor konstruksi dan bangunan (29,3%) dan perdagangan, rumah makan dan akomodasi (28,9%). Hal ini seperti yang terjadi di daerah penelitian petani yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai buruh bangunan merasakan dampaknya yaitu tidak ada lagi tawaran untuk menjadi buruh bangunan.

Dampak pandemi COVID-19 juga dirasakan oleh mereka yang bekerja sebagai pekerja bebas di sektor pertanian dan non pertanian. Pekerja bebas pertanian adalah mereka yang bekerja pada orang lain yang tidak tetap di usaha pertanian, baik usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga dengan menerima upah baik barang atau uang dengan sistem pembayaran harian atau borongan, seperti buruh tani. Sementara pekerja bebas non pertanian, usahanya selain sektor pertanian, seperti pertambangan, perdagangan, bangunan, jasa dan sebagainya. Sebagai contoh adalah tukang/kuli bangunan atau tukang service AC, yang bekerja jika ada panggilan kerja. Hasil survey mencatat sebanyak 55,3% pekerja bebas berhenti bekerja karena tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali. Kemudian sebanyak 37,8% pekerja bebas menyatakan bahwa tawaran pekerjaan semakin berkurang selama pandemi COVID-19. Pedagang tidak lagi bisa berjualan atau penghasilannya berkurang drastis. Hal tersebut dikarenakan diberlakukannya berbagai kebijakan seperti *work from home* (WFH), seluruh sekolah sementara ditutup karena siswa belajar menggunakan metode daring, dan pasar menjadi sepi pembeli sejak diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial. Responden yang biasanya mencari ikan tidak lagi bisa menuju lokasi memancing karena banyak jalan ditutup oleh warga setempat. Sektor-sektor zona merah yang kehilangan pekerjaan cukup tinggi selain sektor konstruksi yaitu sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi (Ngadi et al., 2020; ILO monitor, 2020).

Terjadi penambahan persentase kepala keluarga yang tidak memiliki pekerjaan sampingan dari 36,5 persen sebelum terjadi pandemi menjadi 80 persen setelah pandemi. Tentu saja hal tersebut berdampak pada berkurangan pendapatan rumah tangga. Hasil penelitian ini merupakan cerminan dari laporan Badan Pusat Statistik (2020) bahwa pada Februari 2020, jumlah pengangguran di Indonesia sudah mencapai 6,88 juta atau 4,99 persen.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada kepala keluarga petani di Desa Andaman. Kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan utama sebesar 13,33 persen. Hal yang sama juga terjadi pada pekerjaan sampingan, yang tadinya sebelum terjadi pandemi COVID-19 terdapat 36,7 persen tidak memiliki pekerjaan sampingan, setelah adanya pandemi COVID-19 terjadi peningkatan jumlah kepala keluarga yang tidak memiliki pekerjaan sampingan menjadi 80 persen. Dampak lain dari pandemi COVID-19 adalah adanya pergeseran jenis pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan kepala keluarga petani, yang awalnya semua bekerja di sektor pertanian, kemudian setelah ada pandemi beralih menjadi bekerja di sektor non pertanian. Hal tersebut dilakukan oleh keluarga petani agar tetap memiliki kegiatan yang menghasilkan pendapatan keluarga.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa pandemi COVID-19 membawa dampak yang signifikan terhadap petani. Sebagian besar petani harus menambah pekerjaan sampingan selain pekerjaan utamanya untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari namun menjadi kehilangan pekerjaan sampingan sehingga berdampak pada kondisi ekonominya. Untuk itu, perlu adanya pemikiran mengenai bagaimana mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 agar dapat ekonomi masyarakat dapat bertahan sehingga keluarga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Petani dapat mencari strategi baru dalam menambah penghasilan sehari-hari misalnya dengan mencari peluang kerja baru yang berkaitan dengan kebutuhan di masa pandemi ini. Selain itu, PSBB yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan tidak membawa dampak yang terlalu besar terhadap ekonomi masyarakat khususnya bagi masyarakat yang bekerja di sektor pertanian. Peraturan PSBB yang diterapkan membatasi ruang gerak masyarakat dalam mencari nafkah karena adanya anjuran untuk tetap di rumah. Sebagai salah satu solusinya adalah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga ekonomi masyarakat dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Penerapan protokol kesehatan yang disertai dengan sosialisasi mengenai

bagaimana penerapannya di semua sektor perlu digalakkan kepada masyarakat umum. Diharapkan dengan pengetahuan akan penerapan protokol kesehatan, masyarakat akan semakin sadar untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan roda ekonomi akan tetap berjalan sehingga tidak mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan PSBB selama masa pandemi COVID-19 diharapkan dapat ditegakkan dengan memperhatikan resiko terhadap ekonomi masyarakat seminimal mungkin.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah sampel keluarga yang masih kecil. Hal ini menjadi saran untuk penelitian selanjutnya atau peneliti lain di masa yang akan datang. Meskipun demikian, temuan dalam penelitian ini penting sebagai gambaran dampak pandemi COVID-19 pada pekerjaan khususnya yang bekerja di sektor pertanian.

Referensi

- Asiati, D. (2020). Strategi Bertahan Hidup Bagi Pelaku Usaha dan Tenaga Kerja di Tengah Pandemi COVID 19.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). *Kecamatan Anjir Pasar Dalam Angka 2019*. BPS Kabupaten Barito Kuala.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,99 persen.
- Bartos, B. (1999). *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Chakraborty, I., & Maity, P. (2020). COVID-19 outbreak: Migration, effects on society, global environment and prevention. *Science of the Total Environment*.
- Diskominfo Provinsi Kalsel. (2020). *Kalsel Tanggap Covid-19*. Retrieved from <https://corona.kalselprov.go.id/>
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat PSBB. *Journal of Business and Entrepreneurship*, 2, 90.
- ILO monitor. (2020). Covid-19 And The World of Work (3rd ed). *International Labour Organization*. Geneva.
- Republik Indonesia. (2020). Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. *Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Republik Indonesia. (2020). Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. *Penetapan Bencana Non Alam penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai bencana nasional*.
- Komalasari, T. . (2020). Proyeksi Bappenas: Penduduk Miskin Tahun 2020 Bertambah 2 Juta Orang.
- Mantra, & Bagoes, I. (2004). *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasruddin, Rindam, & Haq, I. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *Urnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 7, 639-648.
- Ngadi, Meilanna, R., & Purba, Y. A. (2020). Dampak Pandemi Covid Terhadap PHK dan Pendapatan Pekerja Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia. Edisi Khusus Demografi Dan COVID-19*, 43-48.
- Nurwati, R. A. M., & R. N. (2020). *Dampak pandemi COVID-19 terhadap peningkatan angka pengangguran di indonesia. Kesejahteraan Sosial*.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan. (2020). Covid-19: Peluang Dan Dampak Terhadap Sektor Pertanian.
- Puspa, A. (2020). Penerapan PSBB Harus Didukung Semua Pihak. *Media Indonesia*.
- Rondhi, Mohammad, & Hariyanto Adi, A. (2018). Pengaruh Pola Pemilikan Lahan Terhadap Produksi, Alokasi Tenaga Kerja, dan Efisiensi Usahatani Padi. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 4(2). <https://doi.org/10.18196/agr.4265>
- Samsudin. (1982). *Dasar-Dasar Penyuluhan dan Modernisasi Pertanian Cetakan Kedua*. Bandung: Angkasa Offset.